



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1 URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM

A. Program dan kegiatan : Jumlah Program 10 Program, 30 kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan :

No.	URUSAN, PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN						REALISASI						TINGKAT CAPAIAN (%)
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	BELANJA HIBAH BARANG	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	BELANJA HIBAH BARANG	TOTAL	
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.200.000	175.202.500	-	-	-	200.402.500	25.200.000	175.010.270	-	-	-	200.210.270	99.90
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12.050.000	-	-	-	12.050.000	-	12.049.970	-	-	-	12.049.970	100.00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.200.000	-	-	-	-	25.200.000	25.200.000	-	-	-	-	25.200.000	100.00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	11.780.000	-	-	-	11.780.000	-	11.780.000	-	-	-	11.780.000	100.00
4	penyediaan alat tulis kantor	-	6.882.500	-	-	-	6.882.500	-	6.882.500	-	-	-	6.882.500	100.00
5	penyediaan barang cetakan dan pengandaan	-	12.100.000	-	-	-	12.100.000	-	12.100.000	-	-	-	12.100.000	100.00
6	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	100.00
7	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	7.590.000	-	-	-	7.590.000	-	7.580.000	-	-	-	7.580.000	99.87
8	penyediaan makanan dan minuman	-	34.370.000	-	-	-	34.370.000	-	34.367.500	-	-	-	34.367.500	99.99
9	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	28.870.000	-	-	-	28.870.000	-	28.715.300	-	-	-	28.715.300	99.46
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	58.560.000	-	-	-	58.560.000	-	58.535.000	-	-	-	58.535.000	99.96
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	57.495.500	-	67.800.000	-	125.295.500	-	57.204.150	-	65.797.500	-	123.001.650	98.17
1	pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	67.800.000	-	67.800.000	-	-	-	65.797.500	-	65.797.500	97.05
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opsional	-	54.545.500	-	-	-	54.545.500	-	54.254.150	-	-	-	54.254.150	99.47
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	100.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	1.950.000	-	-	-	1.950.000	-	1.950.000	-	-	-	1.950.000	100.00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	4.880.000	-	-	-	4.880.000	48.80
1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	4.880.000	-	-	-	4.880.000	48.80

4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	-	4.225.000	-	-	-	4.225.000	93.89
1	Penyusunan Laporan LAKIP SKPD	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	-	4.225.000	-	-	-	4.225.000	93.89
5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.500.000	32.000.000	-	-	10.500.000	50.000.000	7.500.000	41.095.132	-	-	-	48.595.132	97.19
1	Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah	7.500.000	32.000.000	-	-	10.500.000	50.000.000	7.500.000	41.095.132	-	-	-	48.595.132	97.19
6	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	8.582.000	-	-	-	8.582.000	-	8.281.500	-	-	-	8.281.500	96.50
1	Penerbitan NIK Nasional dan penerapn E-KTP	-	8.582.000	-	-	-	8.582.000	-	8.281.500	-	-	-	8.281.500	96.50
7	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	15.599.000	-	-	-	15.599.000	-	15.575.000	-	-	-	15.575.000	99.85
1	Pelaksanaan upacara HUT RI	-	15.599.000	-	-	-	15.599.000	-	15.575.000	-	-	-	15.575.000	99.85
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI/DESA	15.000.000	51.410.000	-	1.500.000	-	67.910.000	15.000.000	51.340.400	-	1.497.500	-	67.837.900	99.89
1	Pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah Nagari	-	32.910.000	-	-	-	32.910.000	-	32.860.000	-	-	-	32.860.000	99.85
2	Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari	15.000.000	18.500.000	-	1.500.000	-	35.000.000	15.000.000	18.480.400	-	1.497.500	-	34.977.900	99.94
9	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	7.490.000	-	-	-	7.490.000	99.87
1	Distribusi Raskin	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	7.490.000	-	-	-	7.490.000	99.87
10	PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	11.800.000	162.683.800	-	12.000.000	8.437.500	194.921.300	11.800.000	161.300.200	-	11.996.000	8.400.000	193.496.200	99.27
1	Pembinaan PKK Kecamatan	-	61.914.000	-	12.000.000	-	73.914.000	-	61.695.200	-	11.996.000	-	73.691.200	99.70
2	Pembinaan bulan bhakti gotong royong	-	12.499.000	-	-	-	12.499.000	-	11.809.000	-	-	-	11.809.000	94.48
3	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	-	18.210.000	-	-	-	18.210.000	-	17.890.000	-	-	-	17.890.000	98.24
4	Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan	-	13.950.800	-	-	-	13.950.800	-	13.907.000	-	-	-	13.907.000	99.69
5	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	11.800.000	3.500.000	-	-	-	15.300.000	11.800.000	3.460.000	-	-	-	15.260.000	99.74
6	Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten	-	19.570.000	-	-	-	19.570.000	-	19.570.000	-	-	-	19.570.000	100.00
7	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan	-	8.722.500	-	-	-	8.722.500	-	8.664.000	-	-	-	8.664.000	99.33
8	Fasilitasi kegiatan kepemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan	-	24.317.500	-	-	8.437.500	32.755.000	-	24.305.000	-	-	8.400.000	32.705.000	99.85
	JUMLAH	59.500.000	524.972.800	-	81.300.000	18.937.500	684.710.300	59.500.000	525.401.652	-	79.291.000	8.400.000	673.592.652	98.38

Tarusan, 09 Februari 2018
CAMAT KOTO XI TARUSAN
KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN
GUSORN YULI ELMI, SSTP
NIP. 19720823 199703 1 003

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2017

NO	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/SLTP	SLTA	D III	S 1	S 2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	GUSDAN YUWELMI, SSTP				√		√					√				
2	DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev					√	√					√				
3	ERVANIDA		√					√			√					
4	YUSNANELI		√					√			√					√
5	H. MAIYULIS		√				√				√					√
6	APRIDAH		√					√			√					√
7	ISMAEL		√				√				√					
8	TRIS JUNAIDI, SE				√		√				√					√
9	ANITAFRIASAFRI, SH				√		√				√					
10	DARWIN		√				√				√					
11	LILIT INDRA			√			√				√					
12	AZRINO WINATA		√				√			√						
13	YENEDI, S.Sos				√		√				√					
14	MIA PARISDA, SH				√			√			√					
15	DASRIAL		√				√			√						
16	ARMANITA	√						√	√							
17	ARFILUS, SH				√		√				√					√
18	RUSDIAN		√				√				√					
19	LENDRA, S.Pd				√		√				√					

20	NOFRIZON, A				✓		✓				✓					
21	AFRIDA, A.Md			✓				✓			✓					
22	GUSTINI		✓					✓			✓					
23	RASWITA		✓					✓			✓					
24	YUNARDI		✓				✓				✓					
25	HERI RAMLI		✓				✓				✓					
26	DEVI ERFIL, SH				✓			✓			✓					
27	IMELDA ROYANI, A.Md			✓				✓		✓						
28	ALIFI M NOER		✓				✓				✓					✓
29	PADRIL, SIP				✓		✓				✓					
30	MULIADI		✓				✓			✓						
31	YUSHELFIAN		✓				✓				✓					
32	WIRMAN		✓				✓			✓						
33	ERMALENI		✓					✓		✓						
34	ENIK, SH				✓		✓				✓					
35	MARDANUS		✓				✓			✓						
36	SALMINELI		✓					✓			✓					



**KABUPATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN**

**: PESIR SELATAN
: KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN
: PEMERINTAHAN UMUM**

**TATARAN PELAKSANA KEBUAKAN (7 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	-7-	(8)	(9)
1	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Program Nasional (Yang melekat di Kementerian/ LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi Jumlah Program Nasional x 100 %	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak ... Program	%	Lihat program nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir
			2	Keberadaan Standar Operating Procedure	Ada	SOP sebanyak 7 buah	SOP sebanyak 7 buah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana,
2	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM 100 %	-PERDA pelaksanaan sebanyak 2 (dua) -PERDA yang seharusnya, sebanyak 2(dua)	100 %	Normalisasi
3	Penataan Kelembagaan Daerah	Pengisian Struktur	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 2	100 %	Sumber data BKD / DUK perangkat daerah
4	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat daerah yang relevan dengan urusan terkait	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan yang harus ada sebanyak 9	tidak ada	Sumber data BKD / perangkat daerah mengacu kondisi perangkat daerah
			6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat daerah terhadap total PNS Kabupaten	PNS Perangkat daerah sebanyak 36 personil Total PNS kabupaten sebanyak	%	Sumber data pengacu kondisi terakhir/Updated thn 2017/BKN
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklat pjm sesuai penjenjangan sebanyak 6 orang Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	67%	Sumber data perangkat daerah mengacu kondisi terakhir/Updated thn 2017
8	Pejabat yang telah memenuhi kepegawaian	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegawaian dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepegawaian sebanyak 9 orang Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	100%	Sumber data perangkat daerah mengacu kondisi terakhir/Updated thn 2017			

Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah : -RENSTRA -RENUA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Apabila ada, Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak Jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA 2.	2 Jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/Perangkat daerah yang bersangkutan
5	Sinkronisasi program RKA Perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENUA perangkat daerah	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENUA perangkat daerah dibagi jumlah program dalam RENUA perangkat daerah yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam renja perangkat RCU1 sebanyak....program Jumlah program renja perangkat daerah yang ditetapkan dalam	%	Sumber data perangkat daerah mengacu dokumen RKPd thn 2016 dan renja perangkat daerah ybs.
	Sinkronisasi program RKA Perangkat daerah dengan Perangkat daerah	11	Jumlah program RENUA RKPd yang dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah program RENUA RKPd yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah dibagi jumlah program dalam RKA perangkat daerah x 100%	Jumlah program RENUA RKPd yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah sebanyak 38 Program Jumlah program dalam RKA perangkat daerah sebanyak 31 program	81,6%	Sumber data perangkat daerah mengacu dokumen RKPd thn 2016 dan renja perangkat daerah ybs.
	Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	12	Jumlah program RENUA Perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat daerah	Jumlah program RENUA Perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat daerah dibagi jumlah program dalam DPA perangkat daerah x 100%	Jumlah program dalam DPA perangkat daerah, sebanyak 10 program	100%	Sumber data perangkat daerah mengacu dokumen RKPd thn 2015 dan dokumen DPA perangkat daerah ybs thn 2017
	Pengelolaan Keuangan Daerah	13	Anggaran perangkat daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran perangkat daerah dibagi total APBD x 100%	Jumlah anggaran perangkat daerah sebesar Rp. 684.710.400 Total belanja APBD sebesar Rp.....	%	Sumber data dari APBD thn 2017 terakhir
		14	Belanja modal terhadap total belanja perangkat daerah	Belanja modal dibagi total belanja perangkat daerah x 100%	Belanja modal perangkat daerah sebesar Rp. 81.300.000,- Total belanja perangkat daerah sebesar Rp. 684.710.400	11,87%	Sumber data dari realisasi APBD Thn 2017
6	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa perangkat daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 2.950.000,- Total belanja barang dan jasa	0,54%	Sumber data dari realisasi APBD Thn 2017
		16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja perangkat daerah	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja perangkat daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 2.950.000,- Total belanja Perangkat daerah	0,43%	Sumber data dari realisasi APBD Thn 2017
		17	Keberadaan laporan keuangan perangkat daerah (Neraca, LRA, Calt)	Ada atau tidak ada laporan keuangan perangkat daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis sbh: 1. Neraca ✓ 2. LRA ✓ 3. CALK ✓	ada	Sumber data dari laporan keuangan perangkat daerah. Teliti apakah laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,
			Laporan keuangan perangkat daerah				

7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen aset perangkat daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset perangkat daerah	ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset daerah	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya	ada	Sumber data dari BPKAD, Dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun
		Penggunaan aset perangkat daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh perangkat daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh perangkat daerah dibagi total asset yang dikuasai perangkat daerah x 100%	Asset yang tidak digunakan 0 Asset yang dikuasai perangkat daerah 0	0%	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di mass media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan Pengumuman ✓ 2. Pos pengaduan ✓ 3. Leaflet ✓	Jumlah sebanyak 3 jenis	Sebutkan jenis fasilitas / prasarana informasi yang ada (difoto / dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survei kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada sebutkan survey kepuasan tentang.....	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh pemda